

Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab

Volume 19 Issue 2 November 2022

ISSN Print: 1693-8135 | ISSN Online: 2686-4231

Penerbit: Departemen Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

Nationally Accredited Journal, Decree No. 200/M/KPT/2020

This Work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

REPOSISI IDENTITAS SOSIAL PEREMPUAN SAUDI PASCA TERBITNYA VISI SAUDI 2030

M. Zulifan¹

¹Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Indonesia. e-mail: arabicstudies15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perubahan sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi dan dampaknya bagi perempuan pasca diluncurkannya Visi Saudi 2030 oleh Muhammad Bin Salman (MBS). Perempuan Arab Saudi sebelumnya diposisikan pada ranah domestik dengan pembatasan yang ketat untuk tidak berpartisipasi di ranah publik. Namun sebagai konsekuensi program liberalisasi ekonomi, MBS menawarkan angin segar perubahan relasi gender di masyarakat Arab Saudi dengan membuka ruang-ruang publik untuk perempuan dapat berkontribusi. Penelitian kualitatif ini memanfaatkan informasi-informasi yang diperoleh melalui media sosial di Arab Saudi untuk dikaji secara kritis dengan menempatkannya sebagai diskursus (wacana). Teori Analisis Wacana Kritis Foucault (1980) dijadikan sebagai pisau analisis untuk menelaah perubahan sosial pada kaum perempuan di Arab Saudi yang digerakkan oleh aktor kerajaan yang selama ini telah menetapkan posisi perempuan secara terbatas. Penelitian ini menemukan adanya perubahan peran sosial dan politik perempuan di Kerajaan Arab Saudi pasca Visi Saudi 2030 diluncurkan. Kini perempuan diberi kebebasan untuk bekerja, menyetir, berbisnis, menjadi diplomat, masuk militer hingga menduduki jabatan politik. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari keterbukaan yang dirancang kekuasaan (MBS). Kerajaan tidak lagi menempatkan masyarakat sipil sebagai objek, namun sebagai subjek pembangunan.

Kata Kunci: Arab Saudi; Visi Saudi 2030; Perempuan; Identitas Sosial

Abstract

This study examines the social and cultural changes of Saudi Arabian society and their impact on women after the launch of Saudi Vision 2030 by Muhammad Bin Salman (MBS). Saudi Arabian women were previously positioned in the domestic sphere with strict restrictions not to participate in the public sphere. However, as a consequence of the economic liberalization program, MBS offers fresh air to change gender relations in Saudi Arabian society by opening public spaces for women to contribute. This qualitative research utilizes the information obtained through social media in Saudi Arabia to be critically studied by placing it as a discourse (discourse). Foucault's theory of Critical

Discourse Analysis (1980) is used as an analytical knife to examine social changes in women in Saudi Arabia driven by royal actors who have so far limited women's position. This study found a change in the social and political roles of women in the Kingdom of Saudi Arabia after the Saudi Vision 2030 was launched. The change is a consequence of the openness designed power (MBS). The kingdom no longer places civil society as an object, but as a subject of development.

Keywords: Saudi Arabia; Saudi Vision 2030; Women; Social Identity.

1. Pendahuluan

Arab Saudi dikenal sebagai negara yang kaku dan konservatif dalam masalah perempuan. Dalam *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*, Arab Saudi berada di urutan terbawah, yakni peringkat 141 dari 144 negara (HRW, 2016). Perempuan di negara ini memiliki batasan-batasan yang ditetapkan kerajaan dan tidak boleh dilanggar maupun diubah tanpa perintah langsung dari Pemerintah Kerajaan. Berdasar sistem monarki, Raja berperan sebagai aktor penting dalam memutuskan norma baik dan buruk dalam kehidupan sosial, terutama dalam relasi gender, hubungan, peran, dan status laki-laki dan perempuan. Raja membatasi partisipasi rakyat dalam ranah politik. Nilai-nilai demokrasi tidak ada karena kuatnya tradisi atau syariat Islam yang digunakan sebagai basis legitimasi (Al-Turaiqi, 2008).

Pemerintah *mengatur* relasi gender secara subordinat. Ruang publik didominasi oleh laki-laki dan perempuan ditempatkan pada ruang domestik yang tertutup. Perempuan selalu diposisikan membutuhkan perlindungan laki-laki jika ingin keluar dari ruang domestik. Norma patriarki bertahan dalam masyarakat Saudi sedemikian rupa sehingga perempuan dikendalikan oleh laki-laki sejak lahir sampai mati. (Khadhar, 2018:19). Praktik segregasi gender di Kerajaan menyebabkan perempuan tidak dapat menikmati kebebasan dalam menentukan pilihan masa depan. Hal ini ditandai dengan adanya larangan mengemudi bagi perempuan, disamping larangan bekerja ke luar rumah. Para perempuan harus diantar oleh walinya (ayah, kakek, paman, suami) untuk bepergian ke luar rumah. Namun apabila wali berhalangan, maka terpaksa mereka bepergian dengan transportasi umum seperti taksi (Al-Namlah, tt.:8).

Isu ketidaksetaraan gender di Arab Saudi terjadi akibat keunikan sejarah dan budaya masyarakatnya, campur tangan pemerintah serta unsur budaya dan agama yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Kerajaan Arab Saudi berkembang dari perjanjian antara agama dan kekuatan politik yang muncul pada pertengahan abad kedelapan belas. Negara Arab Saudi berdiri setelah penyatuan politik pada tahun 1932 dan mengalami perubahan ekonomi dan sosial yang sangat cepat sepanjang abad kedua puluh. Generasi Saudi yang lahir pada tahun 1930-an menjalani kehidupan yang bersifat tradisional dan kesukuan, karena negara baru saja mulai mengembangkan institusi dan identitas nasional. Dalam Undang-undang Dasar negara

pasal 9 disebutkan bahwa keluarga (*usra'*), yang diwakili oleh laki-laki lebih tua, adalah inti dari masyarakat Saudi dan Negara berusaha untuk memperkuat ikatan keluarga (*Al-bakr, dkk, 2017:53*).

Pada tahun 2015 Raja Salman setelah dua tahun berkuasa, akhirnya mengeluarkan keputusan kerajan (*Royal Decree*) untuk menambah ketentuan baru pada keputusan Kerajaan Nomor M/85 tentang aturan lalu lintas (*Arabnews, 27/9/2017*). Keputusan ini menjadi instrumen hukum legal pertama sepanjang sejarah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan izin mengemudi bagi kaum perempuan. Dalam *Royal Decree* ini, Raja Salman menentukan bahwa Pemerintah telah melakukan pertimbangan terkait pro dan kontra terkait perizinan mengemudi bagi perempuan, karenanya akan diatur resmi. Keputusan Kerajaan ini memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan izin mengemudi dan memastikan otoritas pemerintahan menyelesaikan ketentuan ini dalam waktu 30 hari sejak keputusan di keluarkan.

Perubahan signifikan di Arab Saudi dimulai sejak Putra Mahkota Muhammad bin Salman menerbitkan Visi Saudi 2030 pada bulan April 2016. Visi 2030 merupakan rencana besar Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan dan mengurangi ketergantungan mereka pada minyak bumi. Transformasi ini mensyaratkan swasta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ada tiga pilar utama yang menjadi dasar visi Saudi 2030. Pertama, menjadikan Arab Saudi sebagai pusat dunia Arab dan Islam. Kedua, Arab Saudi menjadi kekuatan investasi global dengan menggunakan sumber daya dan keuangan menjadi pembangkit investasi global dan mendiversifikasi pendapatan. Ketiga, menggunakan lokasi strategis Arab Saudi sebagai pusat global yang menghubungkan tiga benua yakni Asia, Eropa dan Afrika (*Visi Saudi 2030:8*).

Dalam rangka mencapai tiga pilar tersebut, salah satu tema besar yang difokuskan adalah pencapaian kesetaraan hak perempuan. Program ekonomi nasional yang digagas MBS membutuhkan dukungan SDM, tidak hanya kaum laki-laki akan tetapi juga perempuan yang merupakan separuh populasi Kerajaan. Oleh karenanya, salah satu tema besar yang difokuskan dalam Visi Saudi 2030 adalah pencapaian kesetaraan hak perempuan. Pasca terbitnya visi Saudi 2030, Kerajaan mengeluarkan pelonggaran atas hak-hak kaum perempuan di Arab Saudi; dibolehkannya perempuan bekerja, dihapuskannya sistem perwalian, pencabutan larangan mengemudi, berpolitik dan terakhir masuk ke bidang militer (<http://vision2030.gov.sa/en>).

Dari pemaparan di atas, Visi Saudi 2030 telah menyebabkan perubahan sosial-budaya yang signifikan di Kerajaan. Setidaknya ada tiga unsur kebudayaan yang mengalami perubahan di Kerajaan pasca Visi 2030 diluncurkan berdasar teori budaya Koentjaraningrat (*Abrari, 2019*).

Unsur Kebudayaan yang pertama adalah sistem religi, ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan menuju negara yang modern dan moderat setelah sebelumnya Saudi dikenal sebagai penganut paham Wahabi yang konservatif. Kedua, sistem kemasyarakatan dengan adanya pencabutan larangan mengemudi dan bekerja di luar rumah bagi perempuan. Sebelumnya, perempuan bekerja, mengendarai mobil dan keluar rumah tanpa mahram adalah hal tabu di Arab Saudi. Dan ketiga, sistem mata pencaharian dengan ditandai program ekonomi berupa privatisasi perusahaan negara, dibukanya bioskop dan tempat hiburan dan wisata, serta digalakkannya ekonomi kreatif di Kerajaan dalam Visi Saudi 2030. Perempuan Saudi kini dilibatkan secara aktif dalam sistem perekonomian nasional Arab Saudi.

Sebelumnya, hubungan otoritas ulama dan kekuasaan terjalin erat. Raja senantiasa berkonsultasi dengan ulama, yang dukungan mereka jelas sangat penting bagi kekuasaan. Dalam hal ini ulama juga berperan mengawal kepentingan pemerintah dan menjadi alat legitimasi politik semua keinginan pemerintah, termasuk masalah perempuan. Namun Visi 2030 yang telah memberikan banyak kebebasan pada masyarakat (termasuk perempuan) telah menyentuh wilayah sensitive agama hingga terjadi penolakan oleh kalangan Ulama.

Kaum perempuan di sisi lain, dimana saat masa awal kerajaan mereka sangat patuh, namun seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan arus informasi, mereka makin menyadari pentingnya kebebasan yang selama ini dibatasi oleh otoritas ulama dan pemerintah. Hal itu terlihat dengan munculnya tokoh perempuan serta gerakan protes mereka pada pemerintah melalui aksi mengemudi dan kampanye mereka di media sosial. Tuntutan modernitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menyebabkan kaum perempuan Saudi mau tidak mau terlibat dalam arus perubahan besar ini. Visi 2030 memberikan kaum perempuan lebih banyak kebebasan dalam ruang publik, setelah sebelumnya mereka mengalami banyak penindasan atas hak-hak mereka di ruang publik.

Kondisi-kondisi di atas tentu akan mengubah peta sosial dan budaya di Kerajaan terutama kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat Arab Saudi modern hingga dapat mereposisi perempuan di Kerajaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Data tersebut berasal dari buku, jurnal, media sosial seperti youtube, skripsi dan sumber internet.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis kemudian dideskripsikan dan akhirnya membentuk suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya.

3. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Analisis Wacana Foucault (1980) dengan teori relasi kuasa dan *governmentality*. Wacana (diskursus) merupakan kajian utama dalam pemikiran Foucault. Foucault berpendapat bahwa diskursus dan kekuasaan datang dari orang yang memiliki kekuasaan dan bersumber dari pemikiran kreatif. Diskursus yang berhubungan erat dengan kekuasaan dalam pandangan Foucault berarti kekuasaan tersebar dimana-mana. Menurut Foucault, penggunaan kekuasaan tidak hanya sebatas pada penggulingan institusi, organisasi birokrasi, maupun negara, melainkan juga proses redistribusi pengaruh serta kemampuan mengubah pola pikir seseorang.

Visi Saudi 2030 merupakan sebuah wacana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Salman kepada masyarakat Saudi dengan menawarkan konsep Saudi baru yang lebih modern dan demokratis. Sebagai sebuah wacana, visi Saudi 2030 dirancang dan diberi makna oleh kekuasaan. Makna itulah yang kemudian dibingkai, dikukuhkan dan disebarkan hingga dijadikan tolak ukur kebenaran.

3.1. Relasi Kuasa dan Governmentality

Sebagaimana yang dikemukakan Foucault (1980), mereka yang berkuasa mempunyai kemampuan untuk menciptakan wacana dominan melalui praktik-praktik diskursif serta wujud-wujud kekuasaan sebagai kebenaran. Wacana tidak bebas nilai. Wacana senantiasa dipakai untuk sarana mengabsahkan apa yang dianggap benar oleh kelompok dominan tanpa menggunakan represi atau kekerasan.

Foucault mengatakan bahwa kekuasaan tidak mengacu pada satu sistem dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, tapi ada bentuk ragam relasi kuasa (Haryatmoko, 2016: 9). Menjalankan relasi kekuasaan dalam model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari yang lain. Jika relasi dominasi mengandaikan subjek subordinat memiliki pilihan tindakan yang sangat terbatas dan tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan, maka relasi kekuasaan memberikan banyak kemungkinan pilihan. *Counduct of counduct* bukan berbicara tentang bagaimana seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, tetapi adanya suatu tindakan tertentu yang dapat menghadirkan pilihan tindakan yang sngat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara (Foucault, 1982).

4. Hasil Penelitian

Terdapat beberapa peristiwa sosial politik yang ikut meneguhkan posisi perempuan di Kerajaan. Pertama, ditemukannya tambang minyak di Arab Saudi pada tahun 1930 yang menimbulkan perubahan dalam skala besar dalam pembukaan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Pendapatan ekonomi dari minyak yang meningkat tajam mengubah gaya hidup dan struktur sosial masyarakat Saudi. Kemudian pada era 1960-an dan 1970-an, seiring munculnya *oil boom* seiring ditemukannya banyak ladang minyak bumi, beberapa perubahan dibuat dan keterbukaan mulai terlihat. Perempuan Saudi diperbolehkan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan tinggi, sedangkan laki-laki Saudi dipekerjakan di kantor pemerintah dan sektor lainnya di tengah pesatnya perkembangan ekonomi negara (Al-Hussein, 2014: 2).

Namun pada tahun 1979 muncul peristiwa pengepungan Masjidil haram di Kota Mekah yang membawa dampak buruk bagi kebebasan perempuan. Sekelompok ekstremis bersenjata mengambil alih Masjidil haram untuk menggugat apa yang mereka pandang sebagai Westernisasi yang berlebihan. Setelah kejadian tersebut, konsekuensi buruk segera menimpa masyarakat Saudi, terutama perempuan (yang hak-haknya dipandang sebagai bagian dari upaya westernisasi). Keterbukaan yang sebelumnya terlihat pun mulai dikurangi. Di waktu yang sama, berkat kekayaan berlimpah negara dan atas upaya untuk memuaskan para fundamentalis agama, pemerintah memilih untuk mengimplementasikan segregasi gender di tempat kerja dan tempat umum. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi sedikitnya porsi tenaga kerja perempuan di Arab Saudi, karena segregasi gender ikut bertanggung jawab pada rendahnya angka partisipasi perempuan di berbagai sektor ekonomi (Al-Hussein, 2014:2).

Peristiwa 1979 merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadikan menguatnya peran kerajaan dalam menentukan pilihan untuk tidak mengadopsi modernisasi Barat. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa ada kekuatan fundamentalis Islam di masyarakat Arab Saudi, yang mempengaruhi sikap pemerintah dalam menentukan sistem pemerintahan tertutup. Konsekuensi dari pilihan itu adalah peran negara (Kerajaan) yang sangat kuat dalam mengatur norma-norma kehidupan masyarakat Arab Saudi. Salah satu yang paling nampak adalah aturan kehidupan yang membatasi perempuan dalam berkiprah di ruang publik.

Sekian lama perempuan Saudi telah menerima aturan yang diskriminatif dan mengandung penindasan gender. Namun fakta adanya perbedaan hukum antar negara-negara muslim di Timur Tengah terutama soal perlakuan kepada perempuan, jelas menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan tersebut terjadi karena faktor sosial politik masing-masing negara, alih-alih perintah agama. Kitab suci dapat ditafsirkan berbeda oleh pola pikir manusia.

Pada tahun 2000-an muncul isu reformasi perempuan Saudi, dengan titik balik serangan teroris 9/11 atas New York dan Washington pada tahun 2001. Waktu itu 15 warga Saudi diketahui terlibat dalam serangan 9/11. Peristiwa 9/11 kemudian memicu tuntutan baik dari luar maupun dari dalam Kerajaan Saudi untuk adanya reformasi, termasuk soal posisi perempuan. Peristiwa 11/9, telah menempatkan negara Arab Saudi sebagai pusat perhatian dunia. Amerika Serikat mendapatkan argumentasi untuk mengintervensi kebijakan kerajaan Arab Saudi. Salah satunya adalah mendorong Arab Saudi untuk memajukan pendidikan, terutama bagi perempuan. Pendidikan perempuan dianggap sebagai penyaringan terhadap ekstremisme agama, dengan harapan bahwa ibu yang berpendidikan akan membesarkan anak-anak yang lebih moderat (Meijer, 2010). Desakan komunitas internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, telah memaksa kerajaan Arab Saudi menerima modernisasi Barat.

Raja Abdullah memprakarsai Dialog Nasional pada 2004 yang berfokus pada perempuan. Salah satu tuntutan dalam dialog adalah status perempuan dalam masyarakat harus direvisi termasuk soal pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian muncullah keputusan Kementrian Saudi tahun 2004 menyerukan pembangunan pusat olahraga dan budaya khusus perempuan. Sejak 2008, Riyadh telah menjadi tuan rumah satu-satunya hotel khusus perempuan di Timur Tengah yang khusus pelayan perempuan bekerja dan hanya tamu perempuan yang diterima. Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan mengidentifikasi beberapa pekerjaan yang wajib memberikan kesempatan khusus bagi perempuan, seperti resepsionis, fotografer dan ahli gizi (Van Geel, 2012: 64).

Raja Abdullah kemudian menerapkan berbagai reformasi pada isu-isu perempuan, seperti melarang pernikahan paksa, menetapkan wakil menteri pendidikan perempuan pertama, dan membuka campuran gender pada kampus KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) pada tahun 2009. Akan tetapi, pemerintah Saudi terus menghormati banyak aturan konservatif dan mendukung nasionalisme agama. Perempuan diperbolehkan bekerja, tetapi hanya di ruang terpisah seperti hotel khusus perempuan yang dibuka di Riyadh pada tahun 2008 dan satu-satunya kota industri perempuan yang mulai beroperasi di Hofuf pada tahun 2012.

Sebelumnya pada 2007 para aktivis HAM dan pembela hak perempuan mengajukan petisi kepada Raja Abdullah. Hal itu dilanjutkan oleh aksi kampanye seorang aktivis perempuan Saudi melalui media sosial yang dilakukan oleh Wajeha al-Huwaider di hari Perempuan Internasional yang memulai kampanye *women2drive*. Ia mengemudi dan mengunggah video mengemudinya ke laman Youtube. Berkat aksinya, dorongan untuk menghapus larangan

mengemudi bagi perempuan di Saudi makin kencang. Kemudian terjadilah aksi protes serupa pada 2011 ketika beberapa perempuan Saudi turut mengunggah video menyetir mereka ke Youtube (Cerioli, 2019 :56).

Peristiwa penting selanjutnya adalah gelombang Arab Spring pada 2011 yang menggerakkan seluruh Timur Tengah dan memunculkan kebijakan reformasi yang semakin signifikan, dengan perempuan Saudi yang sering digambarkan sebagai penerima manfaat pergerakan Arab Spring (Eum, 2018: 122). Sepanjang 2014 terjadi protes oleh belasan perempuan dengan melanggar kebijakan larangan mengemudi. Beberapa dari mereka bahkan memposting pengalaman mengemudi mereka di YouTube atau secara aktif menulis tentang hal itu di Twitter. Kampanye untuk mendukung para perempuan ini, seperti Women2Drive, jelas menghadirkan tamparan yang menantang otoritas kerajaan. Meskipun beberapa dari perempuan ini ditangkap (dan terkadang bahkan dihukum), raja juga mengampuni beberapa dari mereka (Wagemakers, 2012: 27).

Visi Saudi 2030 yang diluncurkan MBS pada 2016 kemudian membawa perubahan besar bagi kebebasan perempuan di Kerajaan. Perempuan yang sebelumnya diposisikan sebagai objek, kini telah berperan aktif sebagai subjek di Kerajaan dengan dicabutnya berbagai aturan diskriminatif yang membelenggu perempuan;

Pertama, perempuan diperbolehkan mengendarai mobil dan bekerja di luar rumah. Sebelum kebijakan baru ini diterbitkan, mengendarai mobil merupakan hal terlarang bagi perempuan di Kerajaan. Perempuan yang melanggar aturan ini akan mendapat sanksi berupa hukuman cambuk atau penjara. Kaum perempuan kini diberikan kepercayaan oleh mahramnya untuk memobilisasi dirinya ke luar rumah untuk memenuhi kebutuhannya (Al-Arabiya, 8/05/2018). Perempuan juga diperbolehkan bekerja di luar rumah setelah sekian lama mereka dilarang untuk melakukannya. Langkah ini menjadi tonggak kebebasan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak sosial mereka di masyarakat. Jika dahulu perempuan hanya diizinkan bekerja di toko-toko pakaian dalam dan kosmetik saja, maka kini pemerintah Arab Saudi melatih mereka untuk ditempatkan sebagai pemandu lalu lintas udara atau air traffic controller. Tercatat ada 26 perempuan Saudi yang kini berkerja di Bandara-bandara Arab Saudi sebagai pemandu lalu lintas udara (www.spa.gov.sa, 11/03/2020).

Kedua, perempuan diizinkan berbisnis dan memiliki usaha sendiri. Sebelumnya perempuan di Arab Saudi wajib meminta izin mahram (suami atau saudara laki-laki) ketika membuka bisnis sendiri. Keputusan ini merupakan turunan kebijakan Mohammad bin Salman

dengan Visi 2030 yang ingin lebih melibatkan warga negara dalam partisipasi membangun ekonomi (Al-Arabiya, 18/02/2018).

Ketiga, perempuan diizinkan menjadi seorang diplomat dan posisi militer. Kementerian Luar Negeri (Wizarah Kharijiyyah) merilis diplomat perempuan sebanyak 113 orang. Salah satu diplomat tersebut adalah Manal Radwan yang menjabat sebagai Koordinator Politik dan sekretaris delegasi Arab Saudi di Markas PBB di New York. Perempuan lain yang pertama kali ditunjuk sebagai diplomat adalah Hala Waleed Al-Jafail, sebagai Konsul Jenderal Arab Saudi di Saint Lucia, sebuah negara kepulauan di Karibia Timur. Terkait kebijakan militer, Direktorat Keamanan Publik Arab Saudi mulai menerima pendaftaran tantara wanita untuk menduduki pos militer di beberapa wilayah seperti Mekah, Madinah, Qassim dan Asir. Pada tahun ini (2021) pemerintah Saudi membuka pendaftaran perempuan Saudi untuk menjadi tentara Kerajaan (al-Arabiya, 15/2/2021). Perempuan juga telah dilibatkan dalam petugas keamanan di Kompleks Masjidilharam. Menariknya, keputusan ini didukung oleh Dewan Syuro Arab Saudi.

Keempat, perempuan diperbolehkan memilih dan dipilih dalam konteks partisipasi politik di Kerajaan. Pada Desember 2015 terbit kebijakan Kerajaan yang membolehkan kaum perempuan memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum tingkat kotamadya secara nasional. Perempuan juga diperbolehkan menduduki jabatan strategis pada Badan Pembuat dan Pengesahan Kebijakan Strategis. Raja Salman sendiri telah menunjuk perempuan untuk pertama kalinya sebagai wakil Menteri Tenaga Kerja yang baru yakni Tamadur binti Youssef al-Rahmah yang juga diberikan tanggungjawab mengurus Departemen Kesejahteraan Sosial dan Keluarga (www.reuters.com 27/02/2018). Sebelumnya, Noor al-Fayez, seorang perempuan lain juga pernah menduduki jabatan sebagai wakil Menteri Pendidikan Arab Saudi. Saudi juga mengangkat putri kerajaan, Rima bin Bandar, sebagai duta besar untuk Amerika Serikat (www.saudiembassy.net/ambassador). Rima menjadi perempuan Saudi pertama yang mengisi posisi strategis itu.

Kelima, Perempuan diperbolehkan tidak mengenakan cadar, burqa, dan niqab (dw.com, 19/03/2018). Kebiasaan perempuan Arab Saudi secara adat memakai abaya dengan paduan hijab biasa atau dengan niqab atau burqa. Hal itu sesuai peraturan Syariah dan budaya berbusana di Kerajaan. Yang mengejutkan, kebijakan ini mendapat dukungan dari salah satu anggota Majelis ulama Arab Saudi, Sheikh Abdullah al-Mutlaq yang mengatakan bahwa perempuan harus berpakaian sopan, tetapi tidak berarti mereka harus mengenakan abaya (bbc.com, 10/02/2018).

Keenam, Perempuan diperbolehkan menonton bioskop dan masuk stadion termasuk menghadiri konser musik. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Putra Mahkota Mohammad bin Salman yang ingin mereformasi birokrasi dan hal-hal lain yang selama ini dianggap di luar otoritas kerajaan. Salah satu reformasi kebijakan yang digulirkan MBS adalah pembukaan kembali bioskop, pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan dan dibolehkannya mereka masuk stadion. Kebijakan ini direalisasikan MBS dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Kerajaan (Yaumul Wathon) Arab Saudi ke- 87 dimana ratusan perempuan memenuhi King Fahd International Stadium, Riyadh, untuk menyaksikan pagelaran konser serta pertunjukan opera perayaan HUT Kerajaan Saudi (Aljazeera, 27/9/2017).

Masyarakat Saudi sendiri menanggapi program reformasi MBS dalam Visi 2030 secara beragam. Secara umum di kalangan muda atau generasi millennial, mereka menyambut dengan tangan terbuka atas perubahan yang terjadi sebagaimana gagasan ini berasal dari generasi muda seperti MBS. Begitu pula bagi kalangan pengusaha khususnya bidang hiburan dan perfilman, mereka lebih punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya di bawah badan milik otoritas pemerintah. Terkait izin mengemudi bagi perempuan, salah seorang menteri menyatakan, diperbolehkannya perempuan mempunyai SIM akan mengurangi angka kecelakaan dan angka kematian yang terjadi di jalanan Arab Saudi. Namun terdapat juga kecaman atas dibolehkannya perempuan mengemudi, salah satunya dari anak muda pengguna media sosial twitter yang mengecam siapa saja yang mengizinkan dan mendukung perempuan mengendarai mobil serta mengancam akan membunuh mereka (Reuters.com, 17/11/2018).

Bila kita perhatikan, perubahan yang terjadi di Arab Saudi pada perempuan pasca Visi Saudi 2030 terlihat berjalan secara natural, namun sebenarnya hal tersebut telah melalui sebuah rencana yang dimainkan kerajaan. Sebagaimana dirumsukan Foucault (1980), kekuasaan tidak berkerja secara structural tapi menyebar. Pertama, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan paksaan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Yang dimaksud normalisasi adalah menyesuaikan dengan norma-norma atau membuat norma-norma. Sedang regulasi akan menyesuaikan dengan aturan-aturan tersebut. Kekuasaan yang menormalisasi akan beroperasi melalui mekanisme atau institusi sosial yang dibangun untuk menjamin kedisiplinan sebuah masyarakat seperti polisi Syariah (muthawwa) yang dibentuk pemerintah Arab Saudi.

Foucault mengaitkan kuasa dan pengetahuan. Bagi Foucault, kekuasaan selalu terartikulasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi bahwa untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Setiap kekuasaan disusun dan

dimapankan oleh pengetahuan dan wacana tertentu (Eriyanto, 2001:66). Bagi Foucault, kebenaran tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang begitu saja. Kebenaran diproduksi oleh setiap kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan secara langsung saling mempengaruhi, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa ada konstitusi korelatif dari bidang pengetahuannya (Foucault, 1979: 27).

Adapun teori tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik seperti halnya larangan menyetir mobil dengan tujuan mengendalikan perempuan agar tidak melanggar syariat Islam sebagaimana ditafsirkan ulama dan pemerintah, agar mereka menutup aurat. Aktivitas mengemudi dinilai kekuasaan sebagai perilaku yang dapat mengekspos aurat perempuan dengan melepas jilbab saat mengemudi. Seperti inilah wacana yang dikembangkan pemerintah Arab Saudi sebelum Visi 2030 dengan memakai norma agama untuk melegitimasi kuasa.

Kedua, kuasa menurut Foucault adalah strategi dengan didukung kedudukannya. Kekuasaan bukan hanya sesuatu yang terstruktur, namun sebuah sebutan yang ditujukan pada satu situasi strategis kompleks dalam tatanan masyarakat. Kekuasaan merupakan soal praktik posisi yang strategis yang saling berkaitan satu sama lain serta senantiasa mengalami perubahan. Perubahan ini terlihat dalam sikap perempuan Arab Saudi dalam menghadapi aturan-aturan di Kerajaan. Pada mulanya mereka mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti larangan mengemudi, larangan menonton bola dan menonton bioskop, serta larangan menduduki posisi dalam pemerintahan.

Namun keadaan tersebut berubah sejak MBS meluncurkan Visi Saudi 2030 yang salah satu visinya menjadikan Arab Saudi lebih moderat dan terbuka. Perjuangan kaum perempuan Arab Saudi untuk meraih kebebasan akhirnya tercapai bersamaan dengan munculnya Visi Saudi 2030. Perubahan ini disambut oleh masyarakat Saudi dengan suka cita, khususnya perempuan yang selama ini mendapat banyak aturan diskriminatif. Sebelumnya mereka akan ditindak oleh polisi syariat (*muthawwa*) yang mengawasi dan menghukum saat perempuan berani mengemudi.

Kejadian ini menandakan bahwa terjadi pergeseran paradigma yang lebih menekankan kebebasan. Perubahan ini terjadi akibat peran dan pengaruh diskursus pengetahuan dan relasi kuasa yang tersebar melalui institusi-institusi sosial seperti media informasi, Lembaga Pendidikan, maupun faktor individu perempuan itu sendiri yang mulai bosan dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.

Ketiga, kuasa tidak bisa disentralisasi dan dilokalisasi, sehingga kuasa ada dimana-mana. Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai sesuatu yang melekat pada kehendak untuk mengetahui yang terumuskan dalam pengetahuan. Oleh karena itu kekuasaan dan pengetahuan adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bagi Foucault, kekuasaan lebih berbentuk sesuatu yang produktif dimana setiap individu bisa ambil bagian dan peran yang akan menghasilkan realitas (Haryatmoko, 2016: 16).

Menurut Foucault kekuasaan tidak dipahami secara negatif seperti Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Kekuasaan tidaklah terpusat tetapi menyebar (omni present) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik kedisiplinan. Sedangkan disiplin adalah bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu. Beroperasinya kekuasaan yang dilegalisasi rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas yaitu dalam tubuh sosial (population). Hal ini dibahas Foucault dalam konsep governmentality (Kamahi, 2017: 117).

Dalam konteks Arab Saudi, kaum perempuan mulai menyadari dan memperjuangkan hak-hak kebebasan mereka atas peraturan yang membatasi ruang gerak perempuan. Pada mulanya tuntutan itu ditentang Kerajaan, namun seiring kondisi ekonomi yang makin melemah akibat harga minyak internasional terus mengalami penurunan, muncullah Visi 2030 oleh MBS dengan fokus mereformasi ekonomi dan sosial Arab Saudi. Adapun pengetahuan dan kesadaran ini diproduksi melalui proses-proses diskursus dan relasi kuasa dan kemudian menciptakan kondisi yang lebih menekankan kebebasan dengan dorongan aktor-aktor internal dan eksternal.

Teori Foucault terkait kekuasaan selanjutnya adalah governmentality (kepengaturan). Governmentality merupakan konsep kekuasaan untuk mempelajari kapasitas otonom individu dalam melakukan control diri dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kepentingan politik-ekonomi negara. Governmentality merupakan bentuk rasionalisasi bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara agar beroperasinya kekuasaan dapat diakui. Dengan demikian, kekuasaan yang dijalankan negara tidak akan melahirkan anti-kekuasaan. Pada akhirnya praktik governmentality mengaburkan beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui governmentality kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial seperti halnya model disciplinary power yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu.

Menurut Foucault, kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui aparat yang koersif, menekan dan menindas melainkan beroperasi secara positif dan produktif. Beroperasinya kekuasaan tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Adapun kekuasaan dapat

dirasakan melalui efek-efeknya. Untuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, *governmentality* dipandang sebagai suatu cara yang diakui dan benar dalam mengatur sesuatu yakni populasi dan sumber daya (Foucault, 1982).

Oleh karena itu, peran aktor lain dalam kerajaan juga menentukan pembentukan wacana di Kerajaan, dalam hal ini peran ulama sebagai aktor penting dalam mengatur perubahan sosial. Mereka menjalankan fungsi *governmentality* melalui fatwa dan penafsiran akan teks Quran dan hadits yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat Saudi.

Dalam konteks tersebut, agenda dalam Visi 2030 sudah barang tentu perlu kepengaturan agar tidak hanya menjadi wacana belaka, namun harus berterima di masyarakat dan dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi dalam hal ini membuat serangkaian kebijakan yang dapat diterima secara sadar oleh masyarakat luas dan sedikit mungkin menimbulkan gejolak dalam negeri. Kebijakan pelonggaran aturan dalam masyarakat dan adanya ruang yang lebih bebas bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk *governmentality* yang dilakukan MBS untuk mengendalikan rakyat Arab Saudi.

5. Kesimpulan

Visi Arab Saudi 2030 mengarahkan negara Arab Saudi dari kondisi sebagai negara yang tertutup dan terpusat pada otoritas kerajaan menjadi negara yang terbuka. Sebagai konsekuensi dari keterbukaan ini adalah perlunya kerajaan membangun hubungan baru antara kerajaan dengan masyarakat. Masyarakat sipil tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan, namun sebagai subjek pembangunan. Lebih jauh lagi keterbukaan Arab Saudi dengan mengadopsi sistem liberal ini, tidak hanya melibatkan emansipasi warga laki-laki, namun juga warga perempuan. Pada gilirannya gerakan mewujudkan visi Arab Saudi 2030 ini pun mengangkat isu ketidaksetaraan gender yang selama ini berlangsung dan mereposisi kedudukan perempuan dalam interrelasi gender di Kerajaan.

Perempuan Saudi kini diberikan ruang kebebasan dalam bidang ekonomi dan sosial-politik. Kebebasan tersebut disambut positif dengan makin meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam ranah sosial, ekonomi dan politik Arab Saudi. Pada gilirannya, partisipasi mereka akan ikut memberikan dampak positif bagi perekonomian Arab Saudi.

Berbagai kebebasan yang diberikan kepada perempuan Saudi merupakan salah satu bentuk *governmentality* untuk menjamin langgengnya kekuasaan. Dalam hal ini Visi Saudi 2030 punya peran dalam mengarahkan masyarakat agar semua kebijakan MBS berterima secara sosial dan pada akhirnya dianggap sebagai kebenaran.

Referensi

- Al-Bakr, F., Bruce, E. R., Davidson, P. M., Schlaffr, E., & Kropiunigg, U. 2017. *Empowered but not Equal: Challenging the Traditional Gender Roles as Seen by University Students in Saudi Arabia*. FIRE: Forum for International Research in Education, 4(1). <http://preserve.lehigh.edu/fie/vol4/iss1/3>
- Al-Namlah, Hamad Ali. (tt). *Women's Rights in Saudi Arabia: The Impact of Women 2 Drive Movement*. Eastern Michigan University, Ypsilanti MI, USA
- Al-Ruwaili, Mamdouh Dawish. 2020. *Females and sport in Saudi Arabia: An analysis of the relationship between sport, region, education, gender, and religion*. University of Stirling.
- BP (Statistical Review of World Energy). 2002. London: BP Amoco p.l.c., diakses 1 26 Maret 2021.
- Cerioli, Luiza. 2019. *Driving In The Middle Of The Road: Paradoxes Of Womens Role Under The New Saudi Arabian Nationalism*. DH Center for Near and Middle Eastern Studies (CNMS) at the University of Marburg, 35037 Marburg — Hessen, Germany.
- Erturk, Yakin. 2009. *Report of The Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Cause and Consequences*, New York, Human Right Council (HRC).
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Foucault, Michel. 2002. *Power Knowledge: Wacana Penguasa/Pengetahuan*. Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Foucault, Michel. 1982. *The Subject and Power*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- Foucault, Michel. 1978. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- Haryatmoko. 2006. *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Journiette, Irina Bernebring. 2014. *Negotiating Identity in the Kingdom, A Conversation with Five Young Saudi Arabia* (Master thesis). Department of Theology, Uppsala Universitet.
- Kamal, M. Syaiful. 2019. *Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi)*. Tesis S2 Program Magister

Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Khadhar, Fouzah. 2018. *Liberation, patriarchal practices and women's use of violence in the domestic setting in Saudi Arabia* (Ph.D Thesis). Nottingham Trent University
- Kinninmont, Jane. 2017. *Vision 2030 and Saudi Arabia's Sosial Contract Austerity and Transformation*. Chatam House, The Royal Institute of International Affair.
- Kingdom of Saudi Arabia, Council of Economic and Development Affairs of Saudi Arabia .2016. 'Saudi Vision 2030', April 2016, <http://vision2030.gov.sa/en>
- Rachman, Muhammad Fauzi Abdul. 2019. *Th Reality behind the Rhetoric: an Examination of Saudi Vision 2030 Using Imminent Critique*. Islamic World and Politics Vol. 3. No. 2, December 2019 ISSN: 2614-0535, E-ISSN: 2655-1330
- Van Geel, Annemarie. 2012. *Whither the Saudi Woman? Gender Mixing, Empowerment and Modernity*, dalam *Saudi Arabia Between Conservatism, Accommodation And Reform*, Roel Meijer and Paul Aarts (editors), Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael. <http://www.clingendael.nl>
- Wagemakers, Joas. 2012. *Arguing for Change under Benevolent Oppression: Intellectual Trends and Debates in Saudi Arabia*, dalam *Saudi Arabia Between Conservatism, Accommodation And Reform*, Roel Meijer and Paul Aarts (editors), Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. <http://www.clingendael.nl>

Sumber Website Media:

- Amnesty International. (2018). *Driving ban and the Women2Drive movement*, <https://www.amnesty.ca/news/driving-ban-and-women2drive-movement>. [Diakses 3 Maret 2022].
- Jamjoom, Mohammed. (2013). *CNN: Saudi cleric warns driving could damage women's ovaries*, <https://edition.cnn.com/2013/09/29/world/meast/saudi-arabia-women-driving-cleric/index.html>. [Diakses 26 Februari 2022].
- Al-Arabiya.net. (2021). *Saudi Arabia opens military recruitment to women in latest move for inclusivity*. <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/02/21/Saudi-Vision-2030-Saudi-Arabia-opens-military-recruitment-to-women-in-latest-move-for-inclusivity>. [Diakses 7 Maret 2022].

- Arab News. (2015). *King Salman issues decree allowing women to drive in Saudi Arabia*, <https://www.arabnews.com/node/1167916/saudi-arabia>. [Diakses 6 Maret 2022].
- Al-Arabiya.net. (2018). *Saudi women to start own business without male permission* <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2018/02/18/Saudi-women-to-start-own-business-without-male-permission> [Diakses 3 Maret 2022].
- Al-Arabiya.net. (2018). *Saudi Arabia announces date for women to take driver's seat* <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2018/05/08/Saudi-Arabia-announces-date-for-women-to-taking-drivers-seat> [Diakses 8 Maret 2022].
- Al-Arabiya.net. (2021). *Saudi Arabia opens military recruitment to women in latest move for inclusivity*. <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/02/21/Saudi-Vision-2030-Saudi-Arabia-opens-military-recruitment-to-women-in-latest-move-for-inclusivity> [Diakses 7 Maret 2022].
- BBC.com.(2022) *Saudi women should not have to wear abaya robes, top cleric says*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43017148> [Diakses 4 Juni 2022].
- Dw.com. (2022) *Saudi Arabia: Prince says women should decide whether to wear robes, face veils*. <https://www.dw.com/en/saudi-arabia-prince-says-women-should-decide-whether-to-wear-robes-face-veils/a-43043071> [Diakses 3 Juni 2022].
- ForeignPolicy.com (2019). *Mohammed bin Salman's Fake Anti-Extremist Campaign*. <https://foreignpolicy.com/2019/06/13/mohammed-bin-salmans-fake-anti-extremist-campaign/> [Diakses 12 September 2022].
- Reuters.com. (2021). *Saudi Arabia reshuffles military, promotes woman at labor ministry* <https://www.reuters.com/article/us-saudi-government-idUSKCN1GA2P3> [Diakses 2 November 2021].
- Salman, Mohammad bin. (2016). *Visi Saudi 2030*. https://www.vision2030.gov.sa/en/file:///C:/Users/User-PC3/aku%20Disertasi%20Bro/Saudi_Vision2030_EN.pdf [Diakses 3 Maret 2022].
- Saudiembassy.net. (2022) *Princess Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud*. <https://www.saudiembassy.net/ambassador> [Diakses 2 September 2022].
- SPA.Gov.SA. (2022). *26 Saudi women work as air traffic controllers in the Kingdom's airports*. <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2046541> [Diakses 7 Juni 2022].